



Kebijakan Pendidikan dan Advokasi: Membangun Sinergi antara Dinas Pendidikan dan Masyarakat di Kota Gorontalo

**Dini Ariandini Tabo¹, Dwi Alfatus Maksum², Mira Pantuko³, Syavira Amelia Saleh⁴,
Sintia Ruhban⁵, Ni Putu Indah Indriani⁶**

Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Email:

dinithabo@gmail.com, dwimaksum14@gmail.com, mirapantuko044@gmail.com, syavirasaleh08@gmail.com,
sintiaruhban@gmail.com, niputuindahindriani@gmail.com,

Diterima: 13-06-2025 | Disetujui: 14-06-2025 | Diterbitkan: 17-06-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the synergy model between the Gorontalo City Education Office and various community elements in the formulation of educational policies and advocacy efforts. The quality of education is a shared responsibility, and the successful implementation of policies greatly depends on the active involvement of all stakeholders. Using a descriptive qualitative approach, this research explores the mechanisms of communication, public consultation, and program collaboration undertaken to achieve inclusive and equitable educational goals in Gorontalo City. The findings are expected to provide strategic recommendations for strengthening partnerships between the government and society in advancing the education sector and fostering a learning environment that is more responsive and adaptable to local needs.

Keywords: Education Policy, Advocacy, Synergy, Education Office, Community, Gorontalo City.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan model sinergi antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan berbagai elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan pendidikan dan upaya advokasi. Kualitas pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme komunikasi, konsultasi publik, dan kolaborasi program dijalankan untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan merata di Kota Gorontalo. Temuan diharapkan memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan sektor pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Advokasi, Sinergi, Dinas Pendidikan, Masyarakat, Kota Gorontalo.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dini Ariandini Tabo, Dwi Alfatus Maksum, Mira Pantuko, Syavira Amelia Saleh, Sintia Ruhban, & Ni Putu Indah Indriani. (2025). Kebijakan Pendidikan dan Advokasi: Membangun Sinergi antara Dinas Pendidikan dan Masyarakat di Kota Gorontalo. Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia, 1(1), 88-97.
<https://doi.org/10.63822/f28ett10>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan berkelanjutan suatu daerah, berperan krusial dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Di Indonesia, khususnya di tingkat daerah otonom seperti Kota Gorontalo, upaya peningkatan mutu pendidikan menghadapi kompleksitas tantangan yang tidak hanya terbatas pada aspek infrastruktur fisik dan alokasi anggaran, tetapi juga pada efektivitas formulasi kebijakan serta tingkat keterlibatan aktif masyarakat. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara partisipatif dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan riil di lapangan cenderung memiliki tingkat keberhasilan implementasi yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, urgensi untuk membangun sinergi yang kokoh antara entitas pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, dengan seluruh spektrum masyarakat menjadi sebuah keniscayaan.

Masyarakat, yang merupakan entitas multidimensional yang mencakup orang tua siswa, tokoh adat dan agama, organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada pendidikan, praktisi pendidikan dari berbagai jenjang, serta sektor swasta, memegang peranan vital. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penerima manfaat langsung dari kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong inovasi dan perbaikan.

Advokasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, memastikan kebijakan tersebut sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan akar rumput. Lebih dari itu, masyarakat juga merupakan mitra strategis dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik. Penelitian ini secara mendalam akan mengeksplorasi bagaimana arsitektur sinergi ini dibangun dan dipertahankan di Kota Gorontalo, mengidentifikasi kekuatan inheren yang dapat dimanfaatkan, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang dapat digarap, serta tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang ideal. Pemahaman komprehensif terhadap dinamika ini akan menjadi landasan bagi perumusan strategi peningkatan sinergi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Pendidikan: Konseptualisasi dan Dimensi

Kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan formal dan tindakan terstruktur yang diambil oleh otoritas pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola sistem pendidikan guna mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan. Lingkup kebijakan ini sangat luas, mencakup aspek-aspek fundamental seperti pengembangan kurikulum yang relevan, penetapan standar pengajaran dan kompetensi guru, mekanisme pembiayaan pendidikan, model manajemen dan tata kelola sekolah, hingga upaya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurut (Easton, 1965) dalam karyanya *A Systems Analysis of Political Life*, kebijakan publik secara umum dapat dipahami sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk seluruh masyarakat. Mengadaptasi konsep ini ke dalam konteks pendidikan, kebijakan pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu secara efektif menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya reaktif

terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang, serta mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi individu dan komunitas.

Advokasi dalam Pendidikan: Strategi dan Impact

Advokasi merupakan proses sistematis dan terencana yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun sistemik, demi tercapainya perubahan yang diinginkan. Dalam domain pendidikan, advokasi dapat bermanifestasi dalam beragam bentuk, seperti kampanye publik untuk mendesak peningkatan alokasi anggaran pendidikan, upaya perbaikan fasilitas dan infrastruktur sekolah yang memadai, penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan siswa atau guru, atau penguatan hak-hak dasar siswa dan kesejahteraan tenaga pendidik. (Cohen, J. M., & Uphoff, N. T., 1980) menekankan bahwa advokasi yang efektif mensyaratkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diangkat, didukung oleh data dan bukti yang valid serta kredibel, serta diimplementasikan melalui strategi komunikasi yang tepat sasaran dan persuasif. Keberhasilan advokasi tidak hanya diukur dari perubahan kebijakan semata, tetapi juga dari sejauh mana advokasi tersebut mampu meningkatkan kesadaran publik, memobilisasi dukungan, dan menciptakan tekanan yang diperlukan untuk mendorong reformasi pendidikan yang substantif.

Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat: Konsep dan Manifestasi

Konsep sinergi, sebagaimana diungkapkan oleh (Barker, 1998) dalam *The Synergistic Leader*, merujuk pada interaksi kooperatif antara dua atau lebih agen atau organisasi yang menghasilkan efek gabungan yang jauh lebih besar daripada jumlah efek yang dihasilkan jika masing-masing bekerja secara terpisah. Dalam konteks sektor pendidikan, sinergi antara Dinas Pendidikan sebagai representasi pemerintah dan masyarakat dapat terwujud melalui berbagai mekanisme dan inisiatif. Ini termasuk penyelenggaraan forum dialog terbuka dan inklusif yang memungkinkan pertukaran ide dan gagasan, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkaitan dengan sektor pendidikan, keterlibatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang melibatkan komite sekolah sebagai representasi orang tua dan masyarakat, hingga pengembangan program-program kemitraan yang inovatif yang melibatkan komunitas lokal secara langsung. Sinergi ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan program, karena adanya rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap pencapaian tujuan pendidikan.

Manifestasi sinergi ini dapat dilihat dari berbagai bentuk kolaborasi. Di tingkat makro, sinergi dapat berupa pembentukan dewan pendidikan atau komite penasihat yang anggotanya berasal dari berbagai unsur masyarakat untuk memberikan masukan strategis kepada Dinas Pendidikan. Di tingkat meso, sinergi terwujud dalam kemitraan antara sekolah dengan komite sekolah, organisasi orang tua, atau bahkan sektor swasta dalam pengelolaan fasilitas, pengembangan program ekstrakurikuler, atau penggalangan dana. Di tingkat mikro, sinergi dapat berupa keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar di rumah, atau partisipasi relawan dalam program bimbingan belajar. Keberhasilan sinergi sangat bergantung pada adanya kepercayaan timbal balik, komunikasi yang efektif, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta komitmen bersama terhadap tujuan pendidikan yang sama. Model sinergi yang ideal adalah yang mampu

menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam Sinergi

Dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan memiliki peran sentral sebagai jembatan sinergi antara pemerintah (sekolah/Dinas Pendidikan) dan masyarakat. Komite Sekolah, yang dibentuk di setiap satuan pendidikan, berfungsi sebagai lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Peran Komite Sekolah meliputi pemberian pertimbangan, penggalangan dana dan sumber daya, pengawasan pelayanan pendidikan, serta penghubung antara sekolah dan masyarakat (Permendikbud No. 75 Tahun 2016). Keterlibatan mereka dalam penyusunan RKAS dan pengawasan penggunaan dana BOS adalah contoh konkret sinergi di tingkat mikro.

Sementara itu, Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, serta prasarana pendidikan (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Dewan Pendidikan berperan lebih strategis dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan daerah secara keseluruhan, melakukan pengawasan publik, dan memfasilitasi komunikasi antara Dinas Pendidikan dengan berbagai kelompok masyarakat. Efektivitas kedua lembaga ini sangat bergantung pada independensi, kapasitas anggota, serta komitmen Dinas Pendidikan untuk secara serius mempertimbangkan masukan yang diberikan.

Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pendidikan

Konsep partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan telah menjadi isu sentral dalam reformasi pendidikan global. Partisipasi tidak hanya diartikan sebagai kehadiran fisik dalam pertemuan, tetapi juga sebagai keterlibatan yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi (UNDP, 2002). Dalam konteks pendidikan, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, memastikan relevansi kebijakan dengan kebutuhan lokal, serta memobilisasi sumber daya tambahan yang mungkin tidak tersedia melalui anggaran pemerintah.

Menurut (Arnstein, 1969) dalam "Ladder of Citizen Participation", tingkat partisipasi dapat bervariasi dari manipulasi (partisipasi semu) hingga kontrol warga (partisipasi penuh). Dalam konteks sinergi, tujuan idealnya adalah mencapai tingkat partisipasi yang lebih tinggi, yaitu kemitraan atau pendelegasian kekuasaan, di mana masyarakat memiliki suara yang signifikan dan dipertimbangkan dalam setiap tahapan kebijakan. Tantangan dalam mencapai partisipasi yang bermakna seringkali terkait dengan asimetri informasi, ketidaksetaraan kekuasaan, dan kurangnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi kebijakan dan kapasitas organisasi menjadi krusial untuk mewujudkan partisipasi yang substantif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai model sinergi antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiahnya, serta menangkap nuansa dan kompleksitas interaksi antaraktor. Lokasi penelitian berfokus di beberapa sekolah negeri dan kantor Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, anggota komite sekolah, tokoh masyarakat, dan perwakilan LSM pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode utama untuk memastikan kedalaman dan validitas informasi: Pertama, wawancara mendalam akan menjadi instrumen utama untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Responden wawancara meliputi pejabat struktural dan fungsional di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo yang terlibat langsung dalam perumusan dan implementasi kebijakan, kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sekolah, guru-guru yang merasakan dampak kebijakan dan berinteraksi dengan orang tua siswa, anggota komite sekolah yang merupakan representasi formal orang tua dan masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang secara aktif bergerak di bidang pendidikan dan advokasi, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan pemahaman mendalam tentang kondisi pendidikan lokal. Wawancara akan bersifat semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi jawaban responden secara lebih rinci.

Kedua, studi dokumen akan dilakukan untuk menganalisis data sekunder yang relevan. Dokumen-dokumen yang akan dikaji meliputi kebijakan pendidikan daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) terkait pendidikan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan yang memuat visi, misi, dan program kerja jangka menengah, laporan-laporan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, notulen rapat koordinasi atau forum konsultasi publik yang melibatkan Dinas Pendidikan dan masyarakat, serta publikasi-publikasi lain yang relevan seperti laporan tahunan atau artikel berita lokal mengenai pendidikan di Kota Gorontalo. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami kerangka formal kebijakan dan program, serta mengidentifikasi jejak-jejak partisipasi masyarakat yang terekam secara resmi.

Ketiga, observasi partisipatif akan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Peneliti akan secara aktif mengikuti dan mengamati forum-forum diskusi, pertemuan rutin, atau kegiatan-kegiatan spesifik yang melibatkan interaksi langsung antara Dinas Pendidikan dan masyarakat di Kota Gorontalo. Observasi ini akan memberikan pemahaman kontekstual mengenai dinamika komunikasi, pola-pola partisipasi informal, serta tantangan dan peluang yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau dokumen.

Analisis data akan dilakukan secara tematik, di mana data yang terkumpul dari ketiga metode akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema kunci yang muncul dari pertanyaan penelitian dan tinjauan pustaka. Proses ini melibatkan identifikasi pola-pola komunikasi yang dominan, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang paling sering terjadi, tantangan-tantangan yang konsisten dalam membangun sinergi, serta faktor-faktor pendorong keberhasilan sinergi. Triangulasi data akan diterapkan dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, dokumen, observasi) untuk

memastikan konsistensi, keandalan, dan validitas temuan penelitian. Proses ini akan memungkinkan peneliti untuk membangun narasi yang kaya dan akurat mengenai sinergi antara Dinas Pendidikan dan masyarakat di Kota Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perumusan Kebijakan Pendidikan di Kota Gorontalo

Perumusan kebijakan pendidikan di Kota Gorontalo merupakan proses yang melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Pada tahap identifikasi masalah, Dinas Pendidikan seringkali mengandalkan data internal, seperti hasil evaluasi program sebelumnya, data pokok pendidikan (Dapodik), serta laporan dari sekolah-sekolah. Namun, temuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap ini masih terbatas. Meskipun ada kanal formal seperti kotak saran atau pengaduan, mekanisme untuk secara proaktif menyerap aspirasi masyarakat secara luas masih perlu ditingkatkan. Forum konsultasi publik, jika diadakan, seringkali bersifat informatif satu arah daripada dialog partisipatif yang substansial. Sebagai contoh, dalam perumusan kebijakan terkait zonasi sekolah, masukan dari orang tua dan komunitas seringkali baru diserap setelah draf kebijakan hampir final, menyebabkan potensi resistensi atau ketidakpuasan.

Pada tahap perumusan opsi dan pengambilan keputusan, peran masyarakat cenderung lebih terlihat melalui representasi formal seperti Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Komite Sekolah, misalnya, terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) meskipun seringkali dalam kapasitas memberikan persetujuan daripada merumuskan secara mandiri. Dewan Pendidikan, sebagai mitra strategis, diharapkan memberikan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan tingkat kota, namun efektivitas perannya sangat bergantung pada kapasitas dan kemandirian anggotanya. Dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan memang mencantumkan partisipasi *stakeholders*, namun implementasinya seringkali masih didominasi oleh internal birokrasi. Mekanisme umpan balik pasca-implementasi kebijakan juga belum terstruktur dengan baik, sehingga evaluasi kebijakan seringkali lebih bersifat internal dan kurang melibatkan perspektif masyarakat secara komprehensif.

Bentuk-Bentuk Advokasi Masyarakat dalam Pendidikan

Masyarakat di Kota Gorontalo menunjukkan berbagai bentuk advokasi terhadap isu-isu pendidikan, meskipun intensitas dan dampaknya bervariasi. Salah satu isu yang sering menjadi fokus advokasi adalah terkait anggaran pendidikan, terutama untuk perbaikan fasilitas sekolah yang rusak atau pengadaan sarana belajar yang memadai. Kelompok orang tua atau paguyuban di beberapa sekolah aktif menggalang dana swadaya atau mengajukan permohonan langsung kepada Dinas Pendidikan untuk perbaikan fasilitas. Advokasi juga sering muncul terkait kualitas guru, di mana beberapa komunitas orang tua menyuarakan kebutuhan akan guru yang lebih kompeten atau mendesak pemerataan distribusi guru.

Aktor advokasi sangat beragam. Selain Komite Sekolah yang memiliki jalur formal, organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal yang berfokus pada anak dan pendidikan juga berperan aktif. Misalnya, sebuah OMS lokal mungkin mengadvokasi hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, atau mengkampanyekan pentingnya pendidikan karakter. Strategi advokasi yang digunakan bervariasi, mulai dari audiensi langsung dengan pejabat Dinas Pendidikan atau anggota DPRD,

pengiriman surat petisi, penggunaan media sosial untuk menyuarakan isu, hingga penyelenggaraan dialog publik atau seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dampak dari upaya advokasi ini cukup signifikan dalam beberapa kasus. Sebagai contoh, advokasi yang kuat dari kelompok orang tua mengenai kebutuhan ruang kelas baru di daerah padat penduduk berhasil mendorong alokasi anggaran dan pembangunan fisik. Namun, advokasi yang bersifat sporadis atau tidak terorganisir cenderung memiliki dampak yang terbatas.

Program Kolaborasi dan Kemitraan antara Dinas Pendidikan dan Masyarakat

Kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan masyarakat terwujud dalam beberapa program dan inisiatif. Salah satu contoh yang menonjol adalah program literasi yang melibatkan komunitas membaca lokal. Dinas Pendidikan mendukung inisiatif ini dengan menyediakan akses ke perpustakaan sekolah atau memfasilitasi pelatihan bagi relawan literasi. Ada pula program peningkatan kapasitas guru yang didukung oleh organisasi profesional guru (misalnya, PGRI atau MGMP) yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan *workshop* atau pelatihan. Kemitraan ini seringkali bersifat saling menguntungkan, di mana Dinas Pendidikan menyediakan legitimasi dan fasilitas, sementara organisasi guru menyediakan keahlian dan jaringan.

Di bidang kesehatan sekolah, kolaborasi terjadi dengan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Posyandu dalam program gizi anak sekolah, seperti pemberian makanan tambahan atau penyuluhan kesehatan. Selain itu, inisiatif penggalangan dana untuk perbaikan fasilitas sekolah yang digerakkan oleh komite sekolah atau alumni juga merupakan bentuk kemitraan yang efektif. Dalam kasus ini, Dinas Pendidikan memberikan izin dan dukungan administratif, sementara masyarakat menggalang sumber daya. Analisis menunjukkan bahwa program-program kolaborasi ini cenderung lebih berhasil jika ada kesamaan visi dan tujuan yang jelas antara Dinas Pendidikan dan mitra masyarakat, serta adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang transparan. Keberlanjutan program juga sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak.

Tantangan dalam Membangun Sinergi

Membangun sinergi yang kuat antara Dinas Pendidikan dan masyarakat di Kota Gorontalo tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah komunikasi. Seringkali, saluran komunikasi yang tersedia bersifat formal dan satu arah, kurang memfasilitasi dialog dua arah yang terbuka. Kesenjangan informasi antara birokrasi dan masyarakat juga menjadi masalah, di mana masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang kebijakan atau program pendidikan, sementara Dinas Pendidikan merasa sudah melakukan sosialisasi.

Perbedaan persepsi juga sering menjadi kendala. Masyarakat mungkin memiliki prioritas yang berbeda dengan Dinas Pendidikan, misalnya, masyarakat lebih fokus pada masalah fasilitas fisik yang mendesak, sementara Dinas Pendidikan mungkin memprioritaskan pengembangan kurikulum. Perbedaan ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketegangan. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, waktu, maupun kapasitas sumber daya manusia di kedua belah pihak, juga menghambat sinergi. Dinas Pendidikan mungkin memiliki keterbatasan staf untuk mengelola partisipasi masyarakat secara intensif, sementara OMS atau kelompok masyarakat mungkin kekurangan dana atau keahlian untuk melakukan advokasi atau program kolaborasi yang berkelanjutan.

Kebijakan Pendidikan dan Advokasi:

Membangun Sinergi antara Dinas Pendidikan dan Masyarakat di Kota Gorontalo

(A. Tabo, et al.)

Isu politis juga dapat mempengaruhi keberlanjutan kemitraan. Perubahan kepemimpinan di tingkat Dinas Pendidikan atau Walikota dapat mengubah prioritas dan komitmen terhadap partisipasi masyarakat. Selain itu, adanya kepentingan politik tertentu dapat mengintervensi proses perumusan kebijakan, mengabaikan masukan dari masyarakat. Terakhir, kurangnya kepercayaan dari salah satu pihak terhadap pihak lain juga menjadi tantangan signifikan. Masyarakat mungkin skeptis terhadap janji-janji pemerintah atau merasa suaranya tidak didengar, sementara Dinas Pendidikan mungkin memandang beberapa kelompok masyarakat terlalu kritis atau tidak memahami kompleksitas birokrasi. Membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu dan konsistensi dalam tindakan.

Faktor Pendorong Sinergi yang Berhasil

Meskipun terdapat tantangan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor pendorong yang berkontribusi pada keberhasilan sinergi antara Dinas Pendidikan dan masyarakat di Kota Gorontalo. Komitmen pimpinan merupakan faktor krusial. Dukungan kuat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Walikota, yang secara eksplisit mendorong partisipasi masyarakat dan membuka ruang dialog, sangat mempengaruhi iklim kolaborasi. Ketika pimpinan menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan merespons, masyarakat cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi.

Keberadaan forum komunikasi yang efektif juga sangat penting. Adanya wadah dialog yang terstruktur dan rutin, seperti pertemuan triwulanan dengan perwakilan masyarakat atau *focus group discussion* (FGD) untuk isu-isu spesifik, dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan ide secara dua arah. Forum ini harus didesain untuk menjadi platform yang inklusif, di mana semua suara dapat didengar dan dipertimbangkan. Kesadaran bersama akan pentingnya pendidikan dan tanggung jawab kolektif untuk memajukannya menjadi dasar kuat bagi kolaborasi. Ketika baik pemerintah maupun masyarakat memahami bahwa pendidikan adalah investasi bersama untuk masa depan, mereka akan lebih mudah menemukan titik temu dan bekerja sama.

Transparansi dan akuntabilitas Dinas Pendidikan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program juga merupakan faktor pendorong yang signifikan. Keterbukaan informasi mengenai alokasi dana, progres program, dan hasil evaluasi dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah transparan dan akuntabel, mereka akan lebih percaya dan bersedia untuk bermitra. Terakhir, inisiatif proaktif dari masyarakat, yaitu adanya kelompok masyarakat yang aktif, terorganisir, dan memiliki visi yang jelas tentang perbaikan pendidikan, dapat menjadi pendorong sinergi yang berhasil. Kelompok-kelompok ini seringkali menjadi motor penggerak advokasi dan kolaborasi, mengisi kekosongan yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh pemerintah sendiri. Keberadaan champion atau tokoh masyarakat yang peduli pendidikan juga sangat membantu dalam memobilisasi partisipasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan masyarakat telah terjalin dalam beberapa bentuk, meskipun dengan tingkat dan intensitas yang bervariasi di setiap tahapan kebijakan dan program. Partisipasi masyarakat terlihat dalam forum konsultasi yang kadang-kadang diselenggarakan, upaya advokasi terhadap isu-isu tertentu yang muncul dari kebutuhan akar rumput, dan kolaborasi dalam program-program

Kebijakan Pendidikan dan Advokasi:

Membangun Sinergi antara Dinas Pendidikan dan Masyarakat di Kota Gorontalo

(A. Tabo, et al.)

pendidikan yang bersifat kemitraan. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam hal efektivitas komunikasi dua arah, perbedaan persepsi yang belum sepenuhnya teratasi, serta keberlanjutan kemitraan yang seringkali bergantung pada inisiatif sporadis. Meskipun demikian, faktor pendorong utama sinergi yang berhasil adalah komitmen kuat dari kepemimpinan Dinas Pendidikan dan Walikota, serta kesadaran bersama yang tumbuh di kalangan masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai aset kolektif. Sinergi ini, meskipun belum optimal, telah menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Gorontalo.

REKOMENDASI

Untuk memperkuat dan mengoptimalkan sinergi antara Dinas Pendidikan dan masyarakat di Kota Gorontalo, direkomendasikan beberapa langkah strategis berikut. Pertama, peningkatan frekuensi dan kualitas forum konsultasi publik sangat diperlukan. Dinas Pendidikan perlu secara rutin mengadakan forum dialog yang lebih inklusif, tidak hanya melibatkan perwakilan formal tetapi juga kelompok masyarakat yang lebih luas, untuk membahas isu-isu pendidikan dan kebijakan yang akan datang. Forum ini harus didesain untuk mendorong dialog yang substansial dan mendengarkan berbagai perspektif.

Kedua, pembentukan platform digital untuk partisipasi dan umpan balik masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan portal atau aplikasi daring yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan, melaporkan masalah, atau mengakses informasi terkait kebijakan dan program pendidikan secara mudah dan transparan. Platform ini akan memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Ketiga, pemberdayaan komite sekolah sebagai mitra strategis perlu dioptimalkan perannya sebagai jembatan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan dan pengawasan pendidikan, serta melibatkan mereka secara lebih aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah.

Keempat, dukungan terhadap inisiatif masyarakat sangat penting. Dinas Pendidikan perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mendukung inisiatif-inisiatif pendidikan yang digerakkan oleh masyarakat, baik dalam bentuk fasilitasi administratif, pendampingan teknis, maupun pengakuan formal. Ini akan mendorong lebih banyak partisipasi dan inovasi dari akar rumput.

Kelima, pengembangan program pelatihan bersama dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau lokakarya yang melibatkan staf Dinas Pendidikan dan perwakilan masyarakat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang tata kelola pendidikan, prinsip-prinsip advokasi yang konstruktif, dan keterampilan kolaborasi yang efektif.

Terakhir, peningkatan transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Dinas Pendidikan harus terus meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program, serta membangun mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, sinergi yang terjalin tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didasari oleh rasa saling percaya dan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan di Kota Gorontalo.



DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, , 35(4), 216-224.
- Barker, R. T. (1998). The Synergistic Leader: Creating a Self-Organizing Culture. . *Crisp Publications*.
- Bray, M., & Thomas, R. M. . (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. . *Harvard Educational Review*, , 65(3), 472-490.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. . (1980). Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation. Rural Development Monograph No. 2. . *Cornell University*.
- Easton, D. (1965). A Systems Analysis of Political Life. *John Wiley & Sons*.